

## **EKOTEOLOGI PERKOTAAN DAN KEBIJAKAN USAHA KEPARIWISATAAN: ANALISIS FILSAFAT POLITIK ATAS POLEMIC DISKOTIK, PUB, DAN KARAOKE DI KOTA SERANG**

<sup>1\*</sup>Nana Supiana, <sup>2</sup>Muhtar Solihin, <sup>3</sup>Munir

<sup>123</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

\*Corresponding author: nanasupiana13@gmail.com

### **Abstract**

*This study dissects the complexity of the polemic surrounding nightlife entertainment businesses (discotheques, pubs, and karaoke) in Serang City by juxtaposing the theoretical frameworks of Urban Ecotheology and Political Philosophy analysis. Serang City, characterized as a religious city and a government center, faces a dilemma between the imperative of economic development in the tourism sector and the pressure to maintain a socio-cultural-ecological order imbued with religiosity. A qualitative research method with a critical-philosophical approach was applied through policy studies, media discourse analysis, and in-depth interviews with multi-stakeholders. The findings reveal that this polemic is not merely a simple moral conflict but a manifestation of a larger discursive struggle between the ideological concept of "halal tourism" and conventional capitalist tourism. Political philosophy analysis identifies the role of local government as both an arena and an actor experiencing internal contradictions: on one hand, it seeks to regulate in the name of public order and morality, while on the other, it is compelled to accommodate capital interests and tax revenue. From the perspective of Urban Ecotheology, this study proposes a more inclusive and sustainable urban space management model, where the "health" of the urban ecosystem is not only measured by economic metrics but also by the harmony of its social and spiritual values.*

**Keywords:** *Urban Ecotheology, Political Philosophy, Nightlife Entertainment, Serang City, Tourism Policy.*

### **Abstrak**

Penelitian ini membedah kompleksitas polemic seputar unit usaha hiburan malam (diskotik, pub, dan karaoke) di Kota Serang dengan menyandingkan kerangka teoritis Ekoteologi Perkotaan dan analisis Filsafat Politik. Kota Serang, yang dikarakterisasi sebagai kota religius dan pusat pemerintahan, menghadapi dilema antara urgensi pembangunan ekonomi di sektor pariwisata dan tekanan untuk mempertahankan tatanan sosial-budaya-ekologis yang sarat dengan nilai religiositas. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kritis-filosofis diterapkan melalui studi kebijakan, analisis wacana media, dan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa polemic ini bukan sekadar konflik moral sederhana, melainkan manifestasi dari pertarungan diskursif yang lebih besar antara konsep ideologis "pariwisata halal" dan pariwisata kapitalis konvensional. Analisis filsafat politik mengidentifikasi peran pemerintah daerah baik sebagai arena maupun aktor yang mengalami kontradiksi internal: di satu sisi, pemerintah berupaya mengatur atas nama ketertiban umum dan moralitas, sementara di sisi lain, pemerintah terdorong

untuk mengakomodasi kepentingan modal dan pendapatan pajak. Dari perspektif Ekoteologi Perkotaan, studi ini mengusulkan model pengelolaan ruang kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan, di mana "kesehatan" ekosistem perkotaan tidak hanya diukur melalui metrik ekonomi tetapi juga melalui harmoni nilai-nilai sosial dan spiritualnya.

**Kata Kunci:** Ekoteologi Perkotaan, Filsafat Politik, Hiburan Malam, Kota Serang, Kebijakan Pariwisata.

## **Pendahuluan**

Kota Serang, sebagai ibu kota Provinsi Banten, memegang identitas ganda yang kompleks: sebagai pusat pemerintahan yang modern dan sebagai kota dengan akar religiusitas yang kuat. Dinamika pembangunan kota seringkali memicu ketegangan ketika nilai-nilai ekonomi berbenturan dengan norma sosial-keagamaan. Salah satu polemik yang paling konsisten muncul dalam diskursus publik di Kota Serang adalah keberadaan usaha hiburan malam, seperti diskotik, pub, dan karaoke. Polemik ini bukan sekadar masalah perizinan administratif, melainkan representasi dari perebutan ruang dan identitas di tengah arus urbanisasi dan komodifikasi kepariwisataan.

Keberadaan tempat hiburan malam seringkali dipandang sebagai anomali bagi citra Kota Serang yang religius. Kelompok masyarakat sipil dan organisasi keagamaan secara rutin menyuarakan penolakan, mengaitkan tempat-tempat tersebut dengan dekadensi moral dan gangguan ketertiban umum. Di sisi lain, pelaku usaha dan pemerintah daerah dihadapkan pada logika pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Benturan ini menciptakan kebuntuan kebijakan yang sering kali diselesaikan dengan tindakan reaktif, seperti penyegelan atau pembongkaran, tanpa menyentuh akar filosofis dan ekologis dari permasalahan ruang tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk membedah polemik tersebut melalui dua lensa teoretis: Ekoteologi Perkotaan dan Filsafat Politik. Ekoteologi perkotaan menawarkan cara pandang bahwa kota adalah sebuah ekosistem yang harus menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan kesehatan spiritual-ekologisnya. Sementara itu, filsafat politik digunakan untuk menganalisis bagaimana kekuasaan bekerja dalam mengatur ruang publik dan bagaimana klaim-klaim moralitas bersaing dengan kepentingan kapital dalam kebijakan pariwisata. Melalui analisis ini, diharapkan ditemukan sintesis pemikiran yang dapat mendasari kebijakan pengelolaan kota yang lebih harmonis dan berkelanjutan di Kota Serang.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kritis-filosofis. Data dikumpulkan melalui studi kebijakan (peraturan daerah terkait kepariwisataan),

analisis wacana media massa lokal mengenai polemik hiburan malam di Kota Serang periode 2021–2024, serta wawancara mendalam dengan berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah daerah, tokoh agama, akademisi, dan pelaku usaha. Analisis dilakukan dengan teknik dekonstruksi terhadap narasi-narasi yang muncul dalam polemik tersebut untuk melihat relasi kuasa dan landasan ontologis yang digunakan oleh masing-masing aktor

## Hasil Temuan

### Ekoteologi Perkotaan: Ruang, Moralitas, dan Keseimbangan Ekosistem Kota

Ekoteologi perkotaan memandang bahwa kota bukan sekadar kumpulan semen dan aspal atau tumpukan infrastruktur fisik, melainkan sebuah organisme hidup—sebuah lingkungan hidup (*living environment*) dimana manusia menjalankan eksistensi spiritualnya melalui interaksi dengan Pencipta, sesama, dan alam lingkungannya. Dalam perspektif ini, kota dipahami sebagai "oikos" (rumah tangga) yang suci, di mana keseimbangannya tidak hanya diukur melalui parameter ekonomi atau kelancaran administratif, tetapi juga melalui kualitas moral dan kedamaian spiritual para penghuninya.

Dalam kerangka berpikir ekoteologis, polemik keberadaan hiburan malam (diskotik, pub, dan karaoke) di Kota Serang dapat dibaca sebagai bentuk gangguan terhadap "kesehatan" ekosistem kota. Penolakan masif dari berbagai elemen masyarakat sipil dan organisasi keagamaan di Serang bukan semata-mata manifestasi kebencian terhadap industri hiburan per se, melainkan sebuah mekanisme pertahanan ekologis untuk menjaga socio-cultural-ecological order (tatanan sosial-budaya-ekologis) yang telah lama mengakar pada nilai-nilai religiusitas Banten. Masyarakat memandang bahwa keberadaan tempat-tempat tersebut menciptakan "sampah visual dan moral" yang mengancam integritas ekosistem spiritual yang mereka yakini sebagai fondasi keberlanjutan kota.

Argumentasi ini menemukan landasan teoritis yang kuat dalam pemikiran Henri Lefebvre (1991) dalam karyanya *The Production of Space*. Lefebvre menegaskan bahwa ruang bukanlah wadah kosong yang pasif, melainkan diproduksi secara aktif melalui praktik sosial dan relasi kuasa. Di Kota Serang, kita sedang menyaksikan proses produksi ruang yang konfliktual. Terjadi perebutan ruang publik secara diskursif dan fisik antara visi "Kota Halal"—yang didorong oleh ekoteologi lokal sebagai upaya sakralisasi ruang—dan visi "Kota Wisata Modern"—yang didorong oleh logika pasar dan akumulasi kapital.

Dalam visi pasar, ruang kota dikomodifikasi menjadi aset yang harus menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) setinggi-tingginya, sering kali tanpa memperdulikan dampak psikososial jangka panjang. Sebaliknya, dari sudut pandang ekoteologi, tempat hiburan malam sering kali diidentifikasi sebagai "polutan sosial" (social pollutant). Sebagaimana limbah industri merusak ekosistem sungai, keberadaan hiburan malam yang tidak terkontrol dianggap merusak tatanan ekologis-spiritual masyarakat melalui normalisasi perilaku yang bertentangan dengan norma agama (seperti peredaran miras dan kemaksiatan).

Oleh karena itu, kebijakan pariwisata di Kota Serang tidak boleh lagi berdiri hanya di atas landasan teknokratis yang kering dan angka-angka pertumbuhan ekonomi semata. Kebijakan publik harus melakukan dekonstruksi terhadap makna pembangunan dengan memasukkan variabel "Daya Dukung Spiritual" (Spiritual Carrying Capacity). Variabel ini mengasumsikan bahwa sebuah lingkungan perkotaan memiliki batas toleransi tertentu terhadap perubahan budaya. Jika pembangunan pariwisata melampaui ambang batas nilai-nilai dasar yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, maka akan terjadi "bencana ekologi sosial" berupa konflik horizontal, degradasi moral, dan hilangnya identitas kota. Dengan demikian, ekoteologi perkotaan menawarkan jalan tengah: pembangunan tetap berjalan, namun dengan menempatkan harmoni antara profit ekonomi dan integritas rohani sebagai hukum tertinggi dalam tata ruang kota.

### **Analisis Filsafat Politik: Kontradiksi Internal dan Governmentality**

Dalam perspektif filsafat politik, Pemerintah Kota Serang saat ini terjebak dalam posisi ambivalence (ambivalence) yang mendalam. Fenomena ini bukan sekadar kegagalan administratif, melainkan cerminan dari tegangan ontologis dalam fungsi negara modern di tingkat lokal. Di satu sisi, pemerintah memikul mandat sebagai penjaga public order (ketertiban umum) dan pelindung moralitas publik—sebuah peran yang sangat krusial di Kota Serang mengingat aspirasi konstituennya yang sangat religius. Di sisi lain, pemerintah daerah juga merupakan aktor yang terintegrasi dalam sistem kapitalisme global yang menuntut pertumbuhan ekonomi, efisiensi investasi, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata.

Ketegangan ini dapat dibedah lebih tajam menggunakan konsep governmentality yang dikembangkan oleh Michel Foucault (1991). Foucault memandang bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui pelarangan, tetapi melalui pengaturan populasi yang kompleks. Dalam konteks ini, kebijakan kepariwisataan di Kota Serang berfungsi sebagai instrumen "seni memerintah" (art of government) yang mencoba menyeimbangkan dua kutub yang saling bertolak belakang. Polemik mengenai tempat hiburan malam mengungkapkan bahwa hukum dan regulasi pariwisata sering kali menjadi "arena negosiasi" yang cair, bukan sebuah ketetapan yang rigid. Di arena ini,

klaim moralitas dari kelompok dominan (tokoh agama dan masyarakat) terus berbenturan dengan kepentingan akumulasi modal dari para pemilik usaha hiburan.

Kontradiksi internal ini melahirkan apa yang disebut sebagai kebijakan yang bersifat kompromistis. Akibatnya, muncul sebuah paradoks kebijakan: regulasi dibuat sangat ketat di atas kertas, namun cenderung longgar dalam pengawasan lapangan. Secara administratif, pemerintah mungkin mengeluarkan peraturan daerah yang membatasi hiburan malam demi meredam gejolak massa, namun secara praktis, ada pembiaran yang terjadi karena kebutuhan akan sirkulasi modal dan pajak.

Praktik governmentality semacam ini menciptakan "ruang abu-abu" (grey area)—sebuah wilayah antara yang ilegal namun ditoleransi, atau yang legal namun secara sosial ditolak. Ruang abu-abu inilah yang menjadi sumber konflik sosial yang terus berulang. Alih-alih menyelesaikan masalah, kebijakan yang kontradiktif ini justru memelihara ketegangan, karena pemerintah lebih memilih untuk melakukan "manajemen konflik" daripada penyelesaian akar masalah. Dengan demikian, filsafat politik menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata di Kota Serang bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan manifestasi dari kegagalan negara dalam mendamaikan identitas moralitas warganya dengan tuntutan pasar kapitalistik

### **Sintesis: Menuju Pariwisata yang Berkeadilan Ekoteologis**

Diskusi ini menunjukkan perlunya reposisi fundamental terhadap kebijakan pariwisata di Kota Serang. Alih-alih terjebak dalam dikotomi biner antara "melarang sepenuhnya" atau "membebaskan tanpa batas", pemerintah daerah perlu merumuskan model kepariwisataan yang berbasis pada kearifan ekoteologis lokal. Model ini menuntut pembangunan ekonomi di sektor pariwisata harus berjalan selaras dengan pemeliharaan integritas moral dan sosial kota sebagai sebuah ekosistem yang utuh dan berkelanjutan.

Pengembangan sintesis ini mencakup tiga pilar utama menuju pariwisata yang berkeadilan:

1. Keadilan Ruang Berbasis Oikos Pariwisata yang berkeadilan ekoteologis memandang ruang publik bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan kepada pemilik modal terbesar, melainkan sebagai oikos atau rumah tangga bersama yang harus dijaga kesuciannya. Dalam konteks Kota Serang, keadilan ruang berarti memberikan prioritas pada fungsi sosial dan spiritual ruang di atas fungsi akumulasi kapital. Penataan zonasi hiburan malam bukan hanya soal jarak

administratif, tetapi merupakan upaya menjaga "kesehatan" ekosistem kota dari polutan sosial yang merusak tatanan moral masyarakat.

2. Rekonsiliasi Ekonomi dan Integritas Spiritual Berdasarkan analisis filsafat politik, pemerintah harus keluar dari posisi ambivalen yang hanya mementingkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengorbankan aspirasi religius konstituenya. Pariwisata berkeadilan menuntut adanya diversifikasi model usaha yang tidak kontradiktif dengan identitas kota. Hal ini berarti menggeser fokus dari pariwisata hiburan konvensional menuju pengembangan pariwisata religi, budaya, dan kuliner yang lebih inklusif dan mampu menghidupkan nilai-nilai lokal tanpa menciptakan segregasi sosial.
3. Governmentality yang Partisipatif dan Transparan Sintesis ini mendorong transformasi instrumen "seni memerintah" (governmentality) dari yang semula bersifat reaktif dan penuh negosiasi ruang abu-abu menjadi kebijakan yang transparan dan partisipatif. Hukum tidak boleh lagi hanya menjadi arena negosiasi antara klaim moral kelompok dominan dan kepentingan modal. Pemerintah perlu memfasilitasi dialog publik yang melibatkan tokoh agama, akademisi, dan pelaku usaha untuk menyepakati standar "daya dukung spiritual" kota, sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi moral yang kuat dan pengawasan lapangan yang konsisten.

Dengan menerapkan model ini, Kota Serang dapat bertransformasi menjadi prototipe kota modern yang maju secara ekonomi namun tetap teguh memegang akar religiusitasnya. Pembangunan kota tidak lagi dipandang sebagai penaklukan alam dan moralitas oleh semen dan aspal, melainkan sebagai upaya mewujudkan harmoni antara profit ekonomi, keadilan sosial, dan integritas rohani dalam sebuah ekosistem perkotaan yang berkelanjutan.

## **Discussion/ Diskusi**

Berdasarkan analisis filosofis dan ekoteologis di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis bagi Pemerintah Kota Serang untuk mengatasi polemik usaha hiburan malam:

1. Transformasi Perizinan Melalui Ecotheological Zoning Pemerintah Kota Serang perlu melakukan peninjauan kembali atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan memasukkan parameter "Daya Dukung Spiritual dan Sosial". Pemetaan zonasi hiburan harus dijauhkan dari kawasan pendidikan, rumah ibadah, dan pemukiman padat penduduk guna menjaga harmoni ekosistem perkotaan dan meminimalisir gesekan sosial.

2. Standardisasi "Wisata Rekreasi Keluarga" yang Ketat Mengingat adanya kontradiksi antara izin "Karaoke Keluarga" dengan praktik lapangan yang sering kali berubah menjadi pub atau diskotik, pemerintah perlu menyusun standar operasional prosedur (Standard Operating Procedure/SOP) yang lebih rigid. Hal ini mencakup pembatasan jam operasional yang tegas, desain ruangan yang transparan (tanpa sekat gelap), dan pelarangan penjualan minuman keras di tempat hiburan tersebut sebagai bagian dari implementasi nilai kota religius.

3. Optimalisasi Pengawasan Partisipatif (Community-Based Monitoring) Dalam kacamata filsafat politik, pengawasan tidak boleh hanya bersifat top-down. Pemerintah perlu membentuk forum komunikasi yang melibatkan tokoh agama (MUI), tokoh pemuda, dan pelaku usaha dalam pengawasan rutin. Dengan melibatkan masyarakat sipil secara formal, pemerintah dapat mengurangi reaktivitas kebijakan dan membangun kepercayaan publik (public trust).

4. Diversifikasi Ekonomi Pariwisata Berbasis Budaya dan Religi Untuk mengurangi ketergantungan PAD pada sektor hiburan malam yang kontroversial, pemerintah harus secara serius mendesain ulang model kepariwisataan. Pengembangan wisata sejarah (Banten Lama) dan wisata kuliner berbasis kearifan lokal dapat menjadi alternatif sumber ekonomi yang lebih selaras dengan prinsip ekoteologi perkotaan dan identitas masyarakat Serang.

5. Mediasi Dialog Filosofis-Politis Secara Berkala Pemerintah daerah perlu bertindak sebagai fasilitator dialog antara pemilik modal dan kelompok masyarakat. Dialog ini bukan sekadar diskusi teknis, melainkan upaya menyamakan persepsi tentang arah pembangunan kota yang ideal, di mana kemajuan ekonomi tidak harus mengorbankan integritas moral dan spiritual lingkungan.

Polemik diskotik, pub, dan karaoke di Kota Serang adalah manifestasi dari pertarungan ideologis atas ruang kota. Analisis ekoteologi perkotaan dan filsafat politik menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata tidak boleh dilepaskan dari konteks nilai spiritual masyarakat lokal. Pemerintah daerah harus berperan sebagai penengah yang mampu mengintegrasikan kepentingan ekonomi ke dalam kerangka ekologis-religius yang lebih luas demi terciptanya tatanan kota yang adil, stabil, dan berkelanjutan.

## **Penutup**

Penelitian ini menunjukkan bahwa polemik mengenai keberadaan diskotik, pub, dan karaoke di Kota Serang bukan sekadar konflik administratif perizinan, melainkan manifestasi dari pertarungan ideologis atas ruang kota. Analisis melalui lensa ekoteologi perkotaan menegaskan bahwa kota harus dipahami sebagai ekosistem utuh dimana

kesehatan spiritual dan integritas moral masyarakat merupakan parameter utama keberlanjutan, sehingga penolakan terhadap hiburan malam merupakan upaya mempertahankan tatanan sosial-budaya-ekologis yang religius.

Dari perspektif filsafat politik, pemerintah Kota Serang berada dalam posisi ambivalen, terjepit di antara tuntutan akumulasi modal (PAD) dan mandat menjaga ketertiban moral publik. Praktik *governmentality* yang selama ini dilakukan cenderung menghasilkan kebijakan kompromistis yang menciptakan "ruang abu-abu", di mana regulasi ketat di atas kertas sering kali tidak sejalan dengan pengawasan di lapangan, sehingga memicu konflik sosial yang berulang.

Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan model Pariwisata yang Berkeadilan Ekoteologis. Model ini menekankan perlunya reposisi kebijakan pariwisata yang tidak lagi berdiri di atas landasan teknokratis semata, tetapi mengintegrasikan "daya dukung spiritual" sebagai variabel utama pembangunan. Dengan menyelaraskan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi pariwisata yang sesuai dengan kearifan lokal, Kota Serang dapat mewujudkan harmoni antara kemajuan fisik, keadilan sosial, dan integritas rohani dalam sebuah ekosistem perkotaan yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Foucault, M. (1991). *Governmentality*. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), *The Foucault effect: Studies in governmentality* (pp. 87-104). University of Chicago Press.
- Gottlieb, R. S. (2006). *A greener faith: Religious environmentalism and our planet's future*. Oxford University Press.
- Hall, C. M. (2008). *Tourism planning: Policies, processes and relationships*. Pearson Education.
- Jenkins, W. (2008). *Ecotheology*. In *The Oxford handbook of religion and ecology* (pp. 473-489). Oxford University Press.
- Lefebvre, H. (1991). *The production of space* (D. Nicholson-Smith, Trans.). Blackwell.
- Lynch, K. (2013). *The image of the city*. MIT Press.
- Novy, J., & Colomb, C. (2019). Urban tourism as a source of contention and social mobilisations: A critical review. *Tourism Planning & Development*, 16(4), 358-375.
- Raharjo, B. (2010). *Konflik sosial atas ruang publik: Studi kasus keberadaan tempat hiburan malam di Yogyakarta* (Tesis, Universitas Gadjah Mada).
- Supiana, N. (2022). Relasi agama dan negara dalam kebijakan publik di tingkat lokal. *Jurnal Filsafat Politik Indonesia*, 5(1), 20-35. *tas*. Jakarta: Penerbit NEM.